

**IMPLEMENTASI UNDANG-UNDANG NOMOR 44 TAHUN 2008
TENTANG PORNOGRAFI DAN UNDANG-UNDANG NOMOR 19
TAHUN 2016 TENTANG INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK
DALAM UPAYA PENANGGULANGAN TINDAK PIDANA
PORNOGRAFI OLEH POLRES BULELENG**

Oleh

Gusti Ayu Christina Ira Yanti, NIM. 1814101142

Jurusan Hukum Dan Kewarganegaraan

Universitas Pendidikan Ganesha

Singaraja, Indonesia

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi terjadinya tindak pidana pornografi mayantara dan upaya yang dilakukan oleh Polres Buleleng dalam mencegah serta menanggulangi tindak pidana pornografi mayantara di wilayah Kabupaten Buleleng. Penelitian ini di latarbelakangi oleh tindak pidana pornografi yang semakin berkembang dari tahun ke tahun, serta dampak yang ditimbulkan akibat dari terjadinya tindak pidana pornografi bagi masyarakat luas. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian yuridis empiris. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan cara studi dokumen dan wawancara bersama Ps. Kaurmintu Satuan Reserse Kriminal Polres Buleleng, dimana nantinya data yang diperoleh tersebut akan dianalisis secara deskriptif kualitatif. Dari hasil penelitian diperoleh bahwa faktor yang menyebabkan terjadinya tindak pidana pornografi adalah faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal meliputi individu itu sendiri dan keluarga, sedangkan faktor eksternal meliputi pengaruh lingkungan, kemajuan teknologi informasi, undang-undang yang mengatur mengenai pornografi serta penegakan hukum. Dalam mencegah dan menanggulangi tindak pidana pornografi Polres Buleleng melakukan berbagai upaya untuk mengatasi kejahatan pornografi ini. Polres Buleleng melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap tindak pidana pornografi yang terjadi di wilayah Kabupaten Buleleng, dalam penyelidikan dan penyidikan tersebut Polres Buleleng bekerja sama dengan Penyedia Layanan Internet (ISP) serta melakukan pengawasan media maya atau patroli siber.

Kata kunci: tindak pidana pornografi, kepolisian, patroli siber.

**IMPLEMENTATION OF LAW NUMBER 44 OF 2008 CONCERNING
PORNOGRAPHY AND LAW NUMBER 19 OF 2016 CONCERNING
ELECTRONIC INFORMATION AND TRANSACTIONS IN AN EFFORT
TO OVERCOME PORNOGRAPHY CRIME BY THE BULELENG
REGIONAL POLICE**

By

Gusti Ayu Christina Ira Yanti, NIM 1814101142

Department Of Law And Citizenship

Ganesha University Of Education

Singaraja, Indonesia

ABSTRACT

This study aims to determine and analyze the factors that influence the occurrence of mayantara pornography crime and the efforts made by the Buleleng Regional Police in preventing and overcoming mayantara pornography crime in the Buleleng Regency area. This research is motivated by pornography crimes that are growing from year to year, as well as the impact caused by the occurrence of pornography crimes for the wider community. This study used a type of empirical juridical research. Data collection techniques are carried out by means of document studies and interviews with Ps. Kaurmintu of the Criminal Investigation Unit of the Buleleng Police, where later the data obtained will be analyzed in a qualitative descriptive manner. From the results of the study, it was obtained that the factors that cause pornography crimes are internal factors and external factors. Internal factors include the individual himself and his family, while external factors include environmental influences, advances in information technology, laws governing pornography and law enforcement. In preventing and tackling pornography crimes, the Buleleng Regional Police made various efforts to overcome this pornography crime. The Buleleng Police conducted investigations and investigations into pornography crimes that occurred in the Buleleng Regency area, in these investigations and investigations the Buleleng Police collaborated with Internet Service Providers (ISPs) and carried out cyber media surveillance or cyber patrols.

Keywords: pornography, policing, cyber patrol